

**PENGARUH PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH, SISTEM
PENGENDALIAN INTERN, DAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI
TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
(Studi Empiris Pada OPD Kabupaten Kebumen)**

Diki Tri Wahyudi¹, Aris Susetyo²
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Putra Bangsa

dikitriwahyudi0@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintah, sistem pengendalian intern, dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah di Kabupaten Kebumen. Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 62 responden dengan metode penentuan sampel adalah metode purposive sampling. Pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada 32 OPD Kabupaten Kebumen yang berada di bagian pengelolaan keuangan/akuntansi, dan diolah menggunakan SPSS Statistic 23.0. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintah dan sistem pengendalian intern tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Sedangkan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

Kata Kunci: standar akuntansi pemerintah, sistem pengendalian intern, dan pemanfaatan teknologi informasi.

Abstract

This study purpose to determine the government accounting standards, internal control system, and utilization of information technology to the quality of local government financial statements in Kebumen District. The number of samples used in this study as many as 62 respondents with the method of determining the sample is the method of purposive sampling. Data collection was done by spreading questionnaires to 32 OPD Kebumen District who are in the financial / accounting management, and processed using SPSS Statistics 23.0. The results of this study indicate that the application of government accounting standards and the internal control systems has no significant effect on the quality of financial statements. While the utilization of information technology has a positive and significant impact on the quality of local government financial statements.

Keywords: Quality if financial report, government accounting standards, internal control system, and utilization of information technology.

PENDAHULUAN:

Seiring berkembangnya Akuntansi Sektor Publik di Indonesia, maka kebutuhan akuntabilitas dan transparansi sebagai wujud pertanggungjawaban atas kinerja pemerintah menjadi suatu tuntutan umum. Akuntabilitas apabila dikaitkan dengan organisasi pemerintahan, dapat didefinisikan sebagai suatu pemberian informasi atas aktivitas dan kinerja pemerintah kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Baik pemerintah pusat maupun daerah, harus bisa menjadi subjek pemberi informasi dalam rangka pemenuhan hak-hak publik. Pihak-pihak yang berkepentingan meliputi semua pemangku kepentingan (*stakeholder*). Selain itu akuntabilitas publik juga berkaitan dengan kewajiban untuk menjelaskan dan menjawab pertanyaan mengenai aktivitas yang telah dilakukan, sedang dilakukan dan yang masih direncanakan oleh organisasi publik (Setyaningrum, 2017:35). Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010, Pemerintah juga berkewajiban untuk

melakukan Transparansi terhadap informasi laporan keuangan.

Transparansi adalah upaya memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban Pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan. Salah satu upaya untuk mewujudkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah adalah dengan membuat dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Informasi yang terdapat dalam laporan keuangan pemerintah daerah dapat dikatakan berkualitas apabila informasi akuntansi tersebut memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan dengan syarat yaitu harus relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Penilaian atas kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dilakukan oleh Badan Pemeriksaan

Kuangan (BPK) dengan melakukan audit setiap satu periode anggaran. Hasil pemeriksaan BPK dinyatakan dalam bentuk opini audit. Terdapat 4 opini audit yang diberikan oleh BPK. Yaitu opini wajar tanpa pengecualian (WTP) termasuk opini wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelas (WTP-DPP), opini wajar dengan pengecualian (WDP), opini tidak wajar (TW) dan opini tidak memberikan pendapat (TMP).

Representasi kewajaran yang dituangkan dalam bentuk opini mempertimbangkan kriteria kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi pemerintah, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas pengendalian internal (Sulistiyowati, 2017: 22). Kabupaten Kebumen merupakan daerah yang telah melakukan transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari data hasil pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen dari tahun 2014-2018.

Tabel 1.
Daftar Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Kebumen Tahun 2014 s.d. 2018

Entitas pemerintah daerah	Opini Tahun 2014	Opini Tahun 2015	Opini Tahun 2016	Opini Tahun 2017	Opini Tahun 2018
Kabupaten Kebumen	WDP	WTP	WDP	WTP	WTP

Sumber: www.bpk.go.id-IHPS I Tahun 2019: 297

Berdasarkan tabel 1 hasil pemeriksaan audit BPK. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kebumen tahun 2014 sampai 2018 mengalami fluktuatif dalam capaian opini audit. Pada tahun 2014 Pemerintah Kebumen mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Kemudian pada tahun 2015 Pemerintah Kebumen sempat memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Namun pada tahun 2016 kembali mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Kemudian pada tahun 2017 sampai 2018 Pemerintah Kebumen berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang berarti adanya perbaikan akuntabilitas dan transparansi penyajian laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang berlaku.

Walaupun LKPD Kebumen telah mendapatkan opini WTP, namun masih terdapat sejumlah catatan yang diberikan BPK. Yaitu berkaitan kelemahan sistem pengawasan intern dan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan. Kelemahan sistem pengawasan terlihat dari pengelolaan pendapatan, dari pemakaian alat berat di DPU PR. Serta pencatatan aset tanah dan peralatan mesin belum lengkap dan mutakhir.

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan sebelumnya, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian Laporan Tugas Akhir dengan judul Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Sistem

Pengendalian Intern, Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi, Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen.

TINJAUAN PUSTAKA

Kualitas Laporan Keuangan

Berdasarkan PSAP 1, (PP Nomor 71 Tahun 2010) laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur terkait posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan terkait alokasi sumber daya.

Suatu laporan keuangan dapat dikatakan bermanfaat bagi para pemakainya jika laporan keuangan tersebut mempunyai nilai informasi yang berkualitas dan dapat digunakan dalam pengambilan keputusan. Menurut Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, laporan keuangan pemerintah dapat dikatakan berkualitas apabila laporan tersebut bersifat relevan, andal, dapat dipahami, dan dapat dibandingkan.

Standar Akuntansi Pemerintah

Menurut (Rusmana, 2017: 6) Standar Akuntansi Pemerintah adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Dengan demikian, SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia. SAP diterapkan dalam lingkup pemerintahan yaitu pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan satuan organisasi di lingkungan pemerintah pusat/daerah.

Sistem Pengendalian Intern

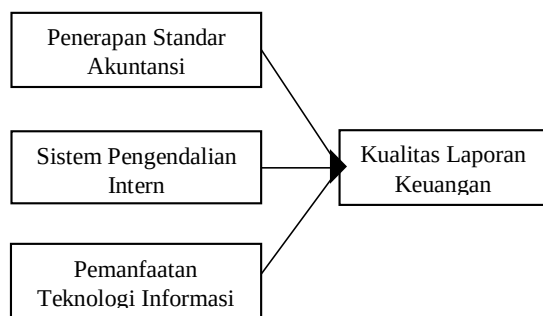
Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sistem pengendalian internal memiliki peran penting guna tercapainya suatu tujuan organisasi pemerintah. Pengendalian internal yang baik dalam suatu organisasi dapat meminimalisir kemungkinan terjadinya kecurangan (*fraud*).

Pemanfaatan Teknologi Informasi

Pemanfaatan teknologi informasi merupakan suatu proses pengolahan dan penyebaran data dengan memanfaatkan alat perangkat komputer dan telekomunikasi untuk kegiatan yang dilakukan seseorang. Teknologi informasi di Indonesia ikut

berkembang sejalan dengan perkembangan peradaban manusia yang semakin modern, yang meliputi perkembangan hardware, software, teknologi penyimpanan data, dan teknologi komunikasi.

Berkembangnya teknologi informasi yang semakin maju akan memudahkan penyusunan laporan keuangan dan pelaksanaan informasi keuangan karena memiliki kekuatan yang lebih akurat dan tepat serta memiliki kemampuan menyimpan data yang lebih besar. Pekerjaan yang dilakukan akan lebih efektif dan efisien, akan tetapi dengan berkembangnya teknologi informasi ini akan membutuhkan dana yang lebih besar. Pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintah, sistem pengendalian intern, dan pemanfaatan teknologi informasi lebih baik dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Model Kerangka Pemikiran

Hipotesis Penelitian

H1: Standar Akuntansi Pemerintah berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kebumen.

H2: Sistem Pengendalian Intern berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kebumen.

H3: Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

METODE PENELITIAN

Populasi dan Sampel

Populasi yang digunakan pada penelitian ini adalah beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Kebumen Provinsi Jawa Tengah yang terdiri dari dinas, badan, kantor, kecamatan, dan sekretaris daerah. Pengambilan sampel terhadap responden dalam penelitian ini didasarkan pada metode *purposive sampling*. Metode ini digunakan karena informasi yang akan diambil berasal dari kriteria tertentu berdasarkan pertimbangan yang sesuai dengan maksud dan tujuan peneliti. Responden dalam penelitian ini adalah pihak yang bertanggungjawab terkait keuangan. Terdiri dari pejabat kepala bagian keuangan dan staff keuangan di beberapa OPD Kabupaten Kebumen. Berdasarkan kriteria diuraikan diatas maka objek penelitian ini dapat dilihat pada tabel 2.

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan data primer. Jenis data primer yaitu data diperoleh secara langsung tanpa perantara dalam bentuk pernyataan secara terstruktur. Teknik yang digunakan adalah dengan menyebar kuisioner atau angket kepada setiap responden. Metode kuisioner ini digunakan untuk memperoleh informasi mengenai Standar Akuntansi Pemerintah, Sistem Pengendalian Intern, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi, sehingga dapat dianalisis pengaruhnya terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah Kabupaten Kebumen.

Tabel 2. Daftar Distribusi Kuesioner

No	OPD Kab. Kebumen	Jumlah Yang Disebar	Jumlah Yang Digunakan
1	Sekretariat Daerah	2	2
2	Sekretariat DPRD	2	2
3	Inspektorat	2	2
4	Dinas Kesehatan	2	2
5	Dinas Pendidikan	2	2
6	DPU PR Kab. Kebumen	2	2
7	Disperkim LH Kab. Kebumen	2	2
8	Satuan Polisi Pamong Praja	2	2
9	Dinsos PPKB Kab. Kebumen	2	2
10	Disnaker KUKM Kab. Kebumen	2	2
11	Distapang Kab. Kebumen	2	2
12	Disperindag Kab. Kebumen	2	2
13	Dishub Kab. Kebumen	2	2
14	DPU PTSP Kab. Kebumen	2	2
15	Dispermades P3A Kab. Kebumen	2	2
16	Dinas Komunikasi dan Informatika	2	2
17	Disporawisata Kab. Kebumen	2	2
18	Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Kebumen	2	2
19	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kab. Kebumen	2	2
20	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2	1
21	Bappeda Kab. Kebumen	2	1
22	BKPPD Kab. Kebumen	2	2

23	BPKAD Kab. Kebumen	2	2
24	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	2	2
25	Kecamatan Klirong	2	2
26	Kecamatan Kutowinangun	2	2
27	Kecamatan Alian	2	2
28	Kecamatan Kebumen	2	2
29	Kecamatan Pejagoan	2	2
30	Kecamatan Sruweng	2	2
31	Kecamatan Adimulyo	2	2
32	Kecamatan Karanganyar	2	2
	Total	64	62

Variabel Penelitian Dan Definisi Operasional Variabel

Variabel dalam penelitian ini terdiri dari variabel dependen dan independen. Variabel dependen yaitu variabel terikat yang hasilnya dipengaruhi oleh variabel independen, sedangkan variabel independen yaitu variabel bebas yang mempengaruhi variabel dependen. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, sedangkan variabel independen dalam penelitian ini terdiri dari Standar Akuntansi Pemerintah, Sistem Pengendalian Intern, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi.

Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah termasuk dalam variabel dependen dalam penelitian ini. Dalam kualitas laporan keuangan pemerintah daerah terdapat beberapa indikator yang digunakan dalam penelitian ini. Indikator tersebut menjelaskan empat karakteristik kualitatif laporan keuangan, yaitu 1) relevan, 2) andal, 3) dapat dibandingkan, 4) dapat dipahami. Kriteria tersebut dijadikan pedoman dalam item-item pertanyaan kuesioner yang mengacu pada penelitian (Maysaroh, 2018).

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah

Standar akuntansi pemerintah merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pada organisasi pemerintahan. Indikator yang digunakan dalam mengukur penerapan SAP. Indikator yang digunakan dalam mengukur penerapan SAP adalah: 1) pemahaman terhadap penyajian laporan keuangan, 2) pemahaman tentang komponen dalam laporan keuangan, 3) pemahaman tentang pengakuan unsur laporan keuangan, 4) pemahaman tentang

pengukuran unsur laporan keuangan, 5) pemahaman tentang koreksi kesalahan, dan 6) pemahaman tentang laporan keuangan konsolidasian. Kriteria tersebut dijadikan pedoman dalam item-item pertanyaan kuesioner yang mengacu pada penelitian (Maysaroh, 2018).

Sistem pengendalian intern

Sistem pengendalian intern memiliki peran penting dalam penerapan tujuan suatu organisasi pemerintah. Dengan adanya pengendalian internal yang baik dalam sebuah organisasi maka akan kecil kemungkinan terjadinya kecurangan (*fraud*). Indikator yang digunakan untuk mengukur SPI adalah: 1) lingkungan pengendalian, 2) penilaian risiko, 3) aktivitas penngendalian, 4) informasi dan komunikasi, serta 5) pemantauan. Kriteria tersebut dijadikan pedoman dalam item-item pertanyaan kuesioner yang mengacu pada penelitian (Maysaroh, 2018).

Pemanfaatan Teknologi Informasi

Teknologi informasi yang semakin berkembang akan memudahkan sumber daya manusiadalam melaksanakan tugasnya agar tercapai tujuan suatu organisasi. Indiakator yang digunakan dalam mengukur pemanfaatan teknologi adalah: 1) perangkat, 2) pengolahan dan penyimpanan, 3) perawatan dan pemeliharaan pada perangkat komputer. Kriteria tersebut dijadikan pedoman dalam item-item pertanyaan kuesioner yang mengacu pada penelitian (Maysaroh, 2018).

Metode Analisis

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

Keterangan:

Y	: Kualitas Laporan Keuangan
a	: Konstanta
b ₁ b ₂ b ₃	: Koefisien Regresi
X ₁	: Standar Akuntansi Pemerintah
X ₂	: Sistem Pengendalian Intern
X ₃	: Pemanfaatan Teknologi Informasi

HASIL PENELITIAN

Uji Validitas

Uji validitas dilakukan dengan melakukan perbandingan nilai r hitung dengan r tabel untuk degree of freedom (df) = N-2, dimana N adalah jumlah sampel. Jumlah sampel pada penelitian ini adalah N=62 dan besarnya df dapat dihitung 62-2 = 60 yang berarti nilai df adalah 60. Dengan tingkat signifikansi 5% (0,05) maka di dapat r tabel = 0,2108. Rincian hasil dari uji validitas adalah sebagai berikut:

Tabel 3.

Uji Validitas Kualitas Laporan Keuangan

Item	Jumlah	Keterangan
Pernyataan 1	0,463	Valid
Pernyataan 2	0,240	Valid

Pernyataan 3	0,231	Valid
Pernyataan 4	0,274	Valid
Pernyataan 5	0,275	Valid
Pernyataan 6	0,334	Valid
Pernyataan 7	0,397	Valid
Pernyataan 8	0,278	Valid

Tabel 4.

Uji Validitas Standar Akuntansi Pemerintah

Item	Jumlah	Keterangan
Pernyataan 1	0,290	Valid
Pernyataan 2	0,228	Valid
Pernyataan 3	0,397	Valid
Pernyataan 4	0,397	Valid
Pernyataan 5	0,264	Valid
Pernyataan 6	0,273	Valid
Pernyataan 7	0,513	Valid
Pernyataan 8	0,371	Valid
Pernyataan 9	0,334	Valid
Pernyataan 10	0,236	Valid
Pernyataan 11	0,318	Valid

Tabel 5.

Uji Validitas Sistem Pengendalian Intern

Item	Jumlah	Keterangan
Pernyataan 1	0,449	Valid
Pernyataan 2	0,234	Valid
Pernyataan 3	0,438	Valid
Pernyataan 4	0,333	Valid
Pernyataan 5	0,459	Valid
Pernyataan 6	0,497	Valid
Pernyataan 7	0,408	Valid
Pernyataan 8	0,254	Valid
Pernyataan 9	0,326	Valid
Pernyataan 10	0,329	Valid

Tabel 6.

Uji Validitas Pemanfaatan Teknologi informasi

Item	Jumlah	Keterangan
Pernyataan 1	0,425	Valid
Pernyataan 2	0,394	Valid
Pernyataan 3	0,545	Valid
Pernyataan 4	0,516	Valid
Pernyataan 5	0,341	Valid
Pernyataan 6	0,445	Valid
Pernyataan 7	0,285	Valid

Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dalam penelitian ini menggunakan uji statistik *Cronbach Alpha (α)* dengan bantuan statistic SPSS 23.00. Suatu variabel atau konstruk dikatakan reliable jika nilai Cronbach Alpha $\geq 0,6$ (Ghozali, 2013). Jika variabel dikatakan reliable maka hasil jawaban responden dari data yang diperoleh konsisten dan stabil sesuai dengan keyakinan responden. Dari penelitian ini hasil uji reliabilitas yang diperoleh disajikan dalam tabel 7.

Tabel 7.

Variabel	Uji Reliabilitas		Keterangan
	Jumlah item	Cronbach Alpha (α)	
Kualitas Laporan Keuangan	8	0,605	Reliabel
Standar Akuntansi Pemerintah	11	0,675	Reliabel
Sistem Pengendalian Intern	10	0,715	Reliabel
Pemanfaatan Teknologi Informasi	7	0,706	Reliabel

Berdasarkan uji reliabilitas data tiap pernyataan dalam kuesioner menunjukkan bahwa nilai Cronbach Alpha seluruh indikator $> 0,6$. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh pernyataan dalam kuesioner yang diajukan kepada responden memiliki tingkat reliabilitas yang baik sehingga layak untuk dijadikan sebagai instrument penelitian. Jadi hasil dari uji reliabilitas menyatakan bahwa uji reliabilitas sesuai dengan pernyataan yang ada dalam metode analisis data menurut Ghozali (2013).

Uji Hipotesis

Tabel 8.
Hasil Uji Hipotesis

	t	Sig.	α	keterangan
SAP	0,207	0,837	0,05	Tidak didukung
SPI	1,880	0,065	0,05	Tidak didukung
TI	2,384	0,020	0,05	Didukung

Hasil pengujian hipotesis 1

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis nilai koefisien pada variabel standar akuntansi pemerintah (SAP) menunjukkan nilai positif sebesar 0,207 dan nilai signifikansinya lebih besar dari $\alpha 0,05$ yaitu 0,837. Dengan demikian dapat diketahui bahwa indikator standar akuntansi pemerintah tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, sehingga hipotesa nol diterima dan hipotesa a ditolak.

Tidak adanya pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dapat disebabkan karena adanya beberapa kendala dalam penerapan SAP, diantaranya sumber daya manusia yang belum memadai, struktur organisasi dan aspek sosialisasi dan pendampingan. Beberapa pegawai di OPD Kabupaten Kebumen bagian pengelolaan keuangan hanya memiliki tingkat pendidikan sarjana sebesar 46,9% namun sebagian besar sumber daya manusia pada bagian pengelolaan keuangan tidak memiliki latar pendidikan akuntansi atau hanya sebesar 7,8% yang memiliki latar pendidikan akuntansi.

Sumber daya manusia yang didukung dengan latar belakang pendidikan akuntansi sering mengikuti pendidikan dan pelatihan, dan mempunyai pengalaman dibidang keuangan akan mampu memahami logika akuntansi dengan baik. Namun kegagalan sumber daya manusia pemerintah daerah dalam menerapkan dan memahami logika akuntansi akan berdampak pada kekeliruan dan ketidaksesuaian laporan keuangan dengan standar yang diterapkan pemerintah.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Rahmah & Zulkifli (2018), Pasha (2018) menyatakan penerapan standar akuntansi pemerintah tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Namun hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Ahsani (2016), Sako dan Lantowa (2018), Rahmawati *et al.* (2018), yang menyatakan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan.

Hasil pengujian hipotesis 2

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis nilai koefisien pada variabel sistem pengendalian intern menunjukkan nilai positif sebesar 1,880 dan nilai signifikansinya lebih besar dari α 0,05 yaitu 0,065. Dengan demikian dapat diketahui bahwa indikator sistem pengendalian intern tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, sehingga hipotesa nol diterima dan hipotesa a ditolak.

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Ambarwati (2019), Budiawan & Purnomo (2014), serta Latifah (2017), menyatakan bahwa variabel sistem pengendalian intern tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Namun hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mene *et al.* (2018) yang menyatakan Sistem Pengendalian Intern Berpengaruh positif terhadap laporan keuangan.

Hasil pengujian hipotesis 3

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis nilai koefisien pada variabel pemanfaatan teknologi informasi menunjukkan nilai positif sebesar 2,384 dan nilai signifikansinya lebih kecil dari α 0,05 yaitu 0,020. Dengan demikian dapat diketahui bahwa indikator pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, sehingga hipotesa nol ditolak dan hipotesa a diterima.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ningrum (2018), Mene *et al.* (2018), dan Rahmawati *et al.* (2018) menyatakan bahwa variabel pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Teknologi informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan atau/ menyebarkan informasi serta komunikasi.

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang bersih, transparan, dan akuntabel serta

pelayanan publik yang yang berkualitas dan terpercaya, diperlukan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen. Pemerintah Daerah harus mampu memberikan akses dan menyediakan informasi bagi masyarakat baik diminta atau tidak. Upaya yang dapat dilakukan adalah mengembangkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik untuk menciptakan pelayanan publik secara online dan memangkas sistem antrian secara panjang dalam mendapatkan pelayanan.

KESIMPULAN

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), Sistem Pengendalian Intern (SPI), dan pemanfaatan Teknologi Informasi (TI), terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di Kabupaten Kebumen. Berdasarkan hasil analisis data yang sudah dilakukan dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, adapun kesimpulan yang diperoleh adalah sebagai berikut:

1. Standar akuntansi pemerintah tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.
2. Sistem pengendalian intern tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.
3. Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

SARAN

Berdasarkan keterbatasan peneliti dapat memberikan beberapa saran yang dapat dipertimbangkan untuk Pemerintah Daerah Kebumen:

1. Pemerintah daerah perlu melakukan pendidikan atau pelatihan tentang pengelolaan keuangan pemerintah daerah bagi para pegawai / staf dibagian keuangan secara berkala untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Perbaikan sistem akuntansi untuk proses pencatatan dan penyusunan laporan keuangan perlu dilakukan untuk memenuhi kebutuhan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam proses penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.
2. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dapat meningkatkan sistem pengendalian intern dengan menetapkan standar kompetensi untuk setiap tugas dan fungsi pada masing-masing posisi yang ada, melakukan analisis risiko secara lengkap terhadap kemungkinan timbulnya pelanggaran terhadap sistem akuntansi, serta menindaklanjuti setiap hasil temuan/ review dan saran yang diberikan oleh BPK/ Inspektorat.
3. Pemerintah Kabupaten Kebumen diharapkan dapat terus mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi untuk menciptakan pelayanan publik secara online dan memangkas antrian secara panjang dalam mendapatkan pelayanan.

DAFTAR PUSTAKA

Ahsani, I. 2016. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Kompetensi Sumber Daya

- Manusia, Dan Sistem Pengendalian Internal Serta Pengaruhnya Kualitas Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Yogyakarta.
- Ambarwati, D. A, 2019. Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Sistem Pengendalian Intern, Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Pada Pemerintah Kabupaten Kebumen. STIE Putra Bangsa .Kebumen.
- Badan Pemeriksa Keuangan. 2019. *Iktisar hasil pemeriksaan semester 1*. BPK. Jakarta.
- Budiawan, D. A., dan Purnomo, B. S. 2014. Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Dan Kekuatan Koersif Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan* 2(1): 276-288.
- Irfan, I. H. 2008. Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah.
- Latifah, A. 2017. Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Daerah. Universitas PGRI Yogyakarta. Yogyakarta.
- Manosoh, implementasi sistem akuntansi pemerintah dalam mewujudkan good government governance pada pemerintah provinsi sulut.
- Mardiana, R. dan H, Fahlevi. 2017. Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Pengendalian Internal DanEfektivitas Penerapan Sap Berbasis AkruaL Terhadap KualitasLaporan Keuangan. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*. 2(2): 30-38.
- Maysaroh, K. W. 2018. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, PenerapanSistem Pengendalian Intern, Penerapan StandarAkuntansi Pemerintahan Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
- Mene, R. E, H. Karamoy., dan J. D, Warongan2018. Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Utara. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern* 13(3): 133-143.
- Ningrum, K. K. 2018. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen. *Skripsi*. Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta.
- Noviyanti, N. A., dan Kiswanto. 2016. Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah, Temuan Audit BPK terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Accounting Analysis Journal* 5(1): 1-10.
- Pasha, A. K. 2018. Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Penelolaan Keuangan Daerah, Sistem Pengendalian Intern, Dan Kompetensi Staf Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Universitas Muhammadiyah Surakarta. Surakarta.
- Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen 2012. <https://www.kebumenkab.go.id/index.php/public/page/index/20> dan pemkab_kebumen@kebumenkab.go.id diakses pada 8 Juni 2020 pukul 10.20 WIB.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 *Standar Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 *Sistem Pengendalian Intern Pemerintah*.
- Rahmah, K., dan Zulkifli. 2018. Pengaruh Penerapan Standar AkuntansiPemerintahan (Sap) Berbasis AkruaL Dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap KualitasLaporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Kidul. *Jurnal Kajian Bisnis*. 26(2): 113-130.
- Rahmawati, A., I.W. Mustika. dan L. Eka.2018.Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan SKPD Kabupaten Kebumen.*Jurnal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi*. 20(2): 8-17.
- Rusmana, O., D. Setyaningrum, Yuliansyah, dan Maryani. 2017. *Akuntansi Pemerintah Daerah*. Edisi 1. Salemba Empat. Jakarta Selatan.

- Sanjaya, A. 2017. Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Intern, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Dan Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Dengan Komitmen Organisasi Sebagai Pemoderasi.
- Setyaningrum, I. 2017. Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Dan Pengawasan Terhadap Kinerja Anggaran Dengan Konsep Value For Money Pada Badan Usaha Milik Daerah (Bumd) Di Yogyakarta. *Skripsi*. Universitas Negeri Yogyakarta. Yogyakarta.
- Sorot Kebumen. 2019 Pemkab Kebumen Kembali Raih Penilaian WTP dari BPK. <https://kebumen.sorot.co/berita-7277-link.html>. diakses pada 4 Desember 2019 pukul 15.40 WIB.
- Sugiyono. 2010. *Statistika Untuk Penelitian*. Cetakan ke-17. Alfabeta. Bandung.
- Sulistiyowati, R. I. 2017. Pengaruh Kualitas Sdm Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Semarang Dengan Sistem Pengendalian Intern Sebagai Variabel Intervening. *Skripsi*. Universitas Negeri Semarang. Semarang.
- Tyas, A. P. 2014. Pengaruh Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Pengendalian Internal Terhadap Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan Daerah. *Naskah Publikasi*. Universitas Muhammadiyah Surakarta. Surakarta.
- Umar, S., dan Felmi, D. 2018. Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Penyajian Laporan Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten Gorontalo.
- Yendrawati, R. 2013. Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Dengan Faktor Eksternal Sebagai Variabel Moderating. Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia*. 17(2): 166-175.